

Media Online	Tribun Jateng
Tanggal	7 Mei 2025
Wilayah	Kabupaten Banyumas



Rizki Tidak Diberi Kembalian Uang Parkir

Halaman 10

► Warga Keluhkan Tarif dan Pelayanan Sejumlah Lokasi Parkir di Purwokerto

BANYUMAS, TRIBUN - Persoalan parkir di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, terus menjadi sorotan warga. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut masalah ini sudah menjadi penyakit lama yang membosankan untuk dibahas, namun tetap tak kunjung selesai.

Saking banyaknya titik parkir, sejumlah warga menyebut Purwokerto sebagai "Kota 1.000 Parkir". Julukan ini mencuat karena hampir di setiap titik keramaian, dari pusat kota hingga pelosok kecamatan, masyarakat selalu dikenakan tarif parkir, bahkan untuk waktu singkat.

Lokasi parkir yang dikeluhkan di antaranya parkir Alun-alun Purwokerto. Sebagai jantung kota, alun-alun menjadi lokasi dengan aktivitas parkir paling padat. Seluruh sisi alun-alun, termasuk di seberang jalan dekat Rita Supermall, dikenai tarif parkir.

Warga mengaku tarif resmi sebenarnya Rp 1.000, namun sering kali tidak diberi kembalian saat membayar lebih.

"Dikasih Rp 2.000 tidak ada kembalian, apalagi Rp 5.000. Yang lebih nyebel, sudah bayar tapi tidak dibantu," keluh Leon Rizki (28), warga Purwokerto, Selasa (6/5).

Lokasi parkir lainnya yang dikeluhkan yaitu wisata Baturraden. Di tempat wisata ini, tarif parkir dinilai terlalu mahal dan ditarik di awal menggunakan karcis. "Baru sampai langsung ditodong Rp 3.000. Kalau musim liburan bisa Rp 5.000," kata Dimas, warga setempat.

Selain kedua lokasi itu, parkir di area ATM juga tak luput dari keluhan. Kemudian, parkir di Pasar Patikraja dan Alfamidi Super Pabuaran. Hampir keseluruhan warga mengeluhkan tarif parkir yang dipungut tidak sesuai ketentuan. Termasuk di lokasi parkir Andang Pangrenan dan Pasar Minggu.

Respons DPRD Banyumas
Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Subagyo, menanggapi keluhan warga tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya sedang me-

STORY HIGHLIGHTS

- Warga mengeluhkan tarif parkir dan pelayanan di berbagai titik parkir di Purwokerto, Banyumas.
- Ketua DPRD Banyumas menyebut bahwa sistem perparkiran saat ini belum tertata.
- Retribusi daerah dari parkir mengalami kebocoran dari potensi Rp 23 miliar per tahun, hanya terealisasi sekitar Rp 1,5 miliar.

nyusun rencana penataan sistem parkir di seluruh wilayah Banyumas. Menurutnya, parkir memiliki dua dimensi, yaitu pajak (untuk swasta) dan retribusi (untuk pelayanan publik), dan harus ada kejelasan pengelolaan.

"Yang melakukan pungutan retribusi mestinya pemerintah. Tapi sekarang banyak yang merasa itu wilayah mereka sendiri. Padahal harusnya ada kerja sama resmi dengan pemerintah," ujar Subagyo.

Ia menilai sistem parkir saat ini belum optimal. Dari potensi pendapatan retribusi hingga Rp 23 miliar per tahun, realisasi baru menyentuh angka Rp 1,5 miliar.

Subagyo mengusulkan agar

setiap juru parkir menyeter langsung ke pemerintah daerah, baik melalui QRIS maupun perbankan. "Jika 1.545 juru parkir setor Rp 10.000 per hari, maka dalam setahun pendapatan bisa mencapai Rp 5,6 miliar," ujarnya.

DPRD menargetkan Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas mampu meningkatkan capaian retribusi parkir dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 5 miliar pada tahun 2026. Subagyo menegaskan, tarif resmi saat ini sebenarnya sudah cukup: Rp1.000 untuk sepeda motor dan Rp2.000 untuk mobil.

"Kalau ke 10 tempat parkir, ya sudah Rp10.000. Artinya ini bukan soal tarif, tapi soal tata kelola," tegasnya. (jti)